

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Damopolii, E., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol. 8 No. 2. Dipetik Maret 18, 2020, dari <http://garuda.ristekbrin.go.id>
- Enga, A. G., Kalangi, L., & Warongan, J. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Malalayang. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14 No. 3. Dipetik Maret 21, 2020, dari <http://garuda.ristekbrin.go.id>
- Febrianto, D., Kertahadi, & Handayani, S. R. (2013). Evaluasi Pengendalian Intern atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5 No. 2. Dipetik Maret 18, 2020, dari <http://garuda.ristekbrin.go.id>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, Vol 1 No. 1. Dipetik Maret 20, 2020, dari <http://jurnal.untan.ac.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *KBBI Daring*. Dipetik Maret 18, 2020, dari <https://kbi.kemdikbud.go.id>

- Kemenkeu RI Ditjen Perimbangan Keuangan. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Kemenkeu DJPK.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Masitoh, S. (2018). *Analisis Efisiensi, efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas*. Banyumas: IAIN Purwokerto.
- Mulyono. (2009). *Penelitian Evaluasi Kebijakan*. Dipetik Maret 18, 2020, dari <https://mulyono.staff.uns.ac.id>
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2011). *Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011)*. Klaten: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2016). *Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016)*. Klaten: Sekretariat Daerah.
- Rahayu, H. A., & Halim, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen, Vol. 3 No. 1*. Dipetik Maret 18, 2020, dari <http://garuda.ristekbrin.go.id>
- Suharsimi, A. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zuraida, I., & Advianto, L. S. (2011). *Penagihan Pajak; Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.